

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA
RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR
KABUPATEN KAYONG UTARA**

Oleh:

TEDDY HERMAWAN^{1*}

NIM : E1011131141

Dr. H. Martoyo, MA² , Dr. H. Pardi, M.AB²

*Email: teddy_r13@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan kepala desa sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, mempengaruhi, memotivasi dan peran informasional dan faktor-faktor penyebab kurang berperannya kepala desa dalam pembangunan. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, masih banyak hasil pembangunan yang tidak terpakai dan terawat. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian ini menggunakan teori peran pemimpin birokrasi menurut pasolong (2008, 33-35) yaitu; 1) Peran pengambilan keputusan. Kepala desa dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, hampir setiap perencanaan pembangunan di musyawaratkan bersama masyarakat; 2) Peran mempengaruhi, memotivasi. kepala desa menyatukan dirinya terhadap semua warga dimanapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan sekat-sekat antara pemerintah dengan masyarakat; 3) Peran informasional. Kepala Desa Rantau Panjang memiliki kinerja yang cukup baik dalam melakukan koordinasi. Kepala desa melaporkan kepada BPD dan kelompok organisasi masyarakat yang ada di desa sejauh mana pembangunan telah terlaksana, apa saja kelemahannya dan kendalanya untuk di evaluasi kembali; 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala desa. Faktor Pendukung : kewibawaan dan kekuasaan. Faktor Penghambat : Kondisi penduduk, Fasilitas dan peralatan. Saran penulis kepada kepala desa, Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Pemimpin, Pengaruh, Motivasi, Pembangunan, Partisipasi

THE ROLE OF VILLAGE HEAD IN THE DEVELOPMENT IN RANTAU PANJANG VILLAGE, SIMPANG HILIR SUB-DISTRICT, NORTH KAYONG REGENCY

By:

TEDDY HERMAWAN^{1*}

NIM : E1011131141

Dr. H. Martoyo, MA², Dr. H. Pardi, M.AB²

*Email: teddy_r13@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University

ABSTRACT

This research aimed to describe and analyze the role of village head as a leader to make decisions, influence, motivate, and be the informational role and the factors causing the village head's lack of role in the development. This research was based on the problem of the lack of community participation in development activities and there were still many development results that were unused and ill-maintained. The research method used was descriptive qualitative research. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data validity techniques used were source triangulation and technical triangulation. This research used the theory of the role of the bureaucratic leader according to Pasolong (2008, 33-35), namely; 1) The role of decision maker. The village head in their own way invited the community to take an active role in every community empowerment program in the village and almost every development plan was deliberated with the community; 2) The role of influencing and motivating. The village head united all citizens wherever and under any circumstances and did not create barriers between the government and the community; 3) Informational role. The Rantau Panjang village head had a fairly good performance in coordination. The village head reported to the Village Consultative Body and the community organization groups in the village to explain the extent of the development that had been carried out and the weaknesses and obstacles for re-evaluation; 4) Factors affecting the role of the village head. Supporting factors: authority and power. Inhibiting Factors: Condition of the population, facilities and equipment. It is suggested that the village head should increase community involvement not only as an object and actor in community empowerment, but also involved in the community in determining and making community empowerment programs.

Keywords: Role, Leader, Influence, Motivation, Development, Participation.

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Penelitian	1
2. Identifikasi masalah Penelitian	4
3. Fokus Penelitian.....	4
4. Rumusan Masalah.....	4
5. Tujuan Penelitian	5
6. Manfaat Penelitian	5
B. TINJAUAN PUSTAKA	
1. Teori.....	5
2. Alur pikir penelitian	7
C. METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	7
2. Lokasi Penelitian.....	7
3. Subjek dan Objek Penelitian	7
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	8
5. Teknik Analisis Data.....	8
6. Teknik Keabsahan.....	8
D. HASIL PENELITIAN	
1. Peranan Kepala Desa dalam Pengambilan Keputusan.....	8
2. Peranan Kepala Desa dalam Mempengaruhi dan Memotivasi.....	9
3. Peranan Informasional Kepala Desa.....	10
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Kepala Desa	10
E. PENUTUP	
1. Kesimpulan	12
2. Saran	13
F. REFERENSI	
1. Buku-Buku	13
2. Dokumen	14
3. Web.....	14

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial. Seiring dengan reformasi dan arus desentralisasi sejak undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian di ubah dengan undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dengan berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan perlu diatur sendiri dengan undang-undang.

Pembangunan desa merupakan sebagian dari pembangunan nasional dan daerah, pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan

yang dilaksanakan secara berencana oleh pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai segala aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rumusan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memposisikan desa pada level yang sangat strategis, karena otonomi yang dimiliki oleh desa diakui secara hukum. Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat dalam rangka kesejahteraan bersama. Otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.

Selain itu tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memimpin tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan (Abadi, 2003, 44).

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan yang mana keberadaan dari pemerintah desa

berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 di sebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan desa, merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Demikian juga dalam mengembangkan atau menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada, sehingga tercipta desa yang otonom, yaitu masyarakat desa mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan Perhatian pemerintah terus meningkat terhadap pembangunan desa dengan semakin meningkatnya berbagai

program dan proyek beserta meningkatnya volume dana dari berbagai departemen dan lembaga non departemen baik melalui bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi serta bantuan dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Semua jenis pembangunan, baik program sektoral, maupun regional banyak di fokuskan kearah pedesaan. Oleh karena itu kehadiran sosok kepala desa sangat di perlukan untuk menunjang keberhasilan pembanguana di desa. Kehadirannya sangat di perlukan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diwilayahnya masing-masing, khususnya untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang pemerintah daerah No. 06 Tahun 2014 Pasal 48. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan :

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa
- b. Pelaksana Kewilayahan
- c. Pelaksana Teknis

Kepala desa sebagai pemimpin masyarakat dan pemimpin pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suatu

masyarakat yang berdaya dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk berperan serta dalam berbagai aspek pembangunan. Kepala desa selaku pemimpin formal adalah orang yang dipilih secara langsung dari penduduk desa, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat serta yang berkaitan dengannya.

Kemudian dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, kepala desa mempunyai wewenang mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif berdasarkan pasal 14 ayat 2 poin g Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. Dengan demikian kepala desa dalam kedudukannya selaku pemimpin unit organisasi pemerintahan desa dituntut untuk menumbuhkan prakarsa dan partisipasi gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan.

Oleh karena itu dalam praktek penyelenggara tugas dan kegiatan kepala desa memiliki peran yang sangat vital baik di bidang pemerintahan dan pembangunan, maupun di bidang pembinaan di masyarakat. Dengan posisi ruang gerak yang luas bagi kepala desa mengharuskan dirinya untuk berkemampuan secara memadai dalam arti mampu berperan secara berdaya dan berhasil guna dalam

memimpin desa sebagai daerah otonom dan ujung tombak pembangunan, terutama dalam langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa karena pada dasarnya pembangunan merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting sebab yang paling tahu apa yang mereka inginkan dan masalah apa yang mereka hadapi. Untuk itu, masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga masyarakat sebagai subjek pembangunan yang harus terlibat dalam kegiatan pembangunan mulai dari merencanakan, melaksanakan, menerima hasilnya sampai pada tahap pemeliharaan hasil-hasil pembangunan

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Pada kenyataannya, berdasarkan hasil pengamatan sementara di lapangan, penulis melihat fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
2. Masih banyak dijumpai hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan tidak terpelihara dengan baik. Indikasi

ini dapat dilihat dari kondisi bangunan yang tidak terawat.

3. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait program kerja dan rencana pembangunan desa. Hal ini terlihat dari ketidaktahuan masyarakat terkait progress pembangunan yang ada di desa.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan peneliti, agar penelitian yang dilakukan baik dalam mencari data-data lapangan maupun dalam menganalisis data lapangan yang telah terkumpul tersebut memiliki arah yang jelas. Maka peneliti memfokuskan masalah pada peranan kepala desa sebagai seorang pemimpin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait program kerja dan pembangunan desa.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peranan Kepala Desa sebagai seorang pemimpin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pembangunan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir

Kabupaten Kayong Utara dari berbagai aspek.

5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan kepala desa dalam mengambil keputusan, mempengaruhi, memotivasi dan peran informasional dan faktor-faktor penyebab kurang berperannya kepala desa dalam pembangunan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang hilir Kabupaten Kayong Utara.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan peranan kepala desa dalam pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai wahana untuk melatih berfikir secara ilmiah dan sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kejadian.

- b. Sebagai bahan masukan bagi aparat pemerintah desa khususnya kepala desa untuk mengoptimalkan peranannya dalam pembangunan desa.

- c. Bagi pihak akademisi, sebagai wacana unuk dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan peranan kepala desa secara lebih mendalam.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori

a. Peranan

Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang timbul karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga sangat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan (Thoah 2010, 10)

b. Kepala Desa

Berdasarkan pendapat Soetarjo dan Wiradi (dalam Wasistiono dan Tahir 2007, 14) desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahannya sendiri.

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan secara

tegas susunan organisasi pemerintah desa, yaitu pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa terdiri atas : Sekretariat Desa; Pelaksana Kewilayahan; dan Pelaksana Teknis. Untuk lebih jelasnya maka uraian yang ada dalam pasal 26 menyatakan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

c. Pembangunan Desa

Menurut Adisasmita (2004, 04) “pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong”.

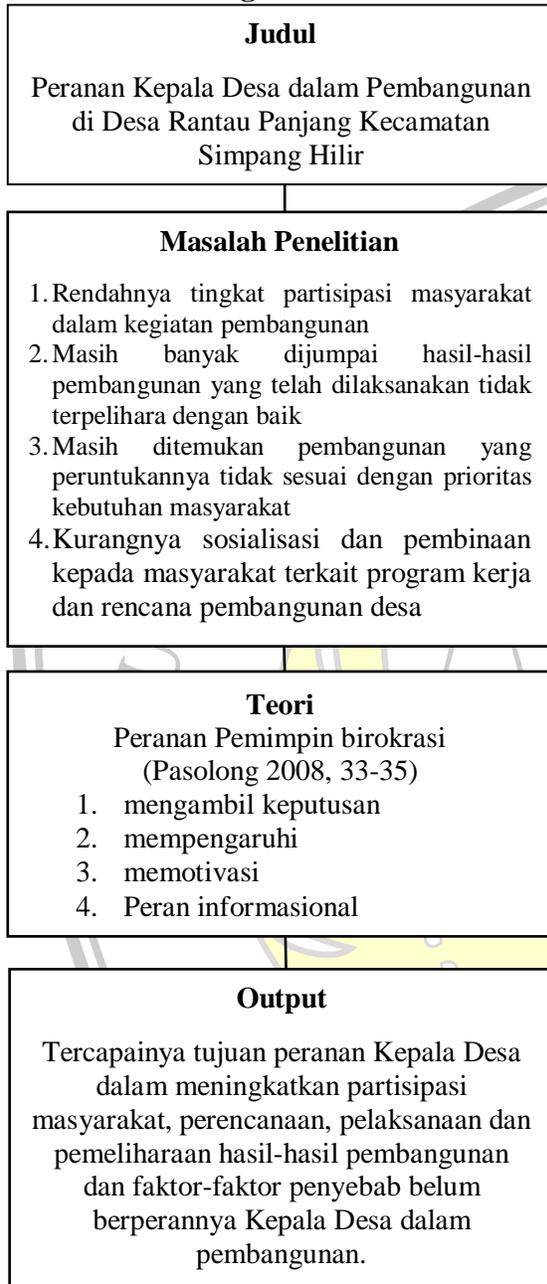
Sedangkan Ndraha (dalam Tjokrowinoto 2007, 35), mengemukakan bahwa pembangunan desa merupakan seluruh rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan mempertinggi taraf hidup masyarakat desa berdasarkan asas kekuatan sendiri daripada masyarakat desa, asas

pemufakatan bersama-sama anggota-anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu kesuluruhan dalam rangka kebijakan umum yang sama.

Berdasarkan definisi di atas mempunyai implikasi penting yaitu : pertama, adanya penekanan pada kemampuan menyeluruh dari penduduk pedesaan dalam mempengaruhi lingkungan mereka. Kedua, peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan kemampuan yang tidak dibatasi pada kelompok tertentu, melainkan harus merata bagi seluruh masyarakat. Dari define itu juga didapat bahwa sasaran pokok pembangunan masyarakat dan aparat pemerintah desa terutama Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pemerintah desa dan pemimpin di desa.

2. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Teori



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif karena data dan hasil penelitian lebih berkenaan

dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan (Sugiyono 2010, 14). Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2020 hingga September 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala BPD
2. Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kaur Perencanaan
3. Kepala Dusun 2 Orang
4. Tokoh Masyarakat 5 Orang

Objek dalam penelitian ini adalah peranan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Adapun alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah pedoman wawancara, dan alat dokumentasi.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Bogdan menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, menjabarkannya kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain, tujuan analisis data dalam penelitian ini adalah untuk menyempitkan data dan membatasi penelitian sehingga menjadi data yang tersusun secara sistematis.

6. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber,

sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

D. HASIL PENELITIAN

1. Peranan Kepala Desa dalam Pengambilan keputusan

Salah satu peran penting Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, antara lain melaksanakan program pemberdayaan desa, perannya disini adalah bagaimana seorang Kepala Desa mengambil keputusan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan. Berkenaan dengan hal ini, yang menjadi peranan Kepala Desa dalam mengambil keputusan diantaranya, menetapkan skala prioritas, strategi, struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, menunjuk penanggung jawab dan pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan. Untuk menetapkan sasaran program desa sudah semestinya Kepala Desa melibatkan mitra kerja seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, dan Kelompok Kerja melalui musyawarah desa, namun kenyataannya tidak demikian. Padahal kesemuanya itu merupakan potensi yang

harus dimiliki oleh Kepala Desa dalam mengambil keputusan, selain potensi internal yang sudah dimiliki seperti ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kepemimpinannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan menunjukkan bahwa Kepala Desa dalam pengambilan keputusan sebagai kewenangannya sudah dilakukan sesuai prosedur dan melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai stakeholder dalam program pembangunan.

2. Peranan Kepala Desa dalam Mempengaruhi dan Memotivasi

Hubungan pengaruh dan motivasi adalah kalau peran mempengaruhi efektif, maka peran memotivasi akan mudah dilakukan, sebaliknya jika pemimpin tidak mampu menanamkan pengaruh terhadap bawahannya, maka sulit baginya untuk melakukan motivasi (Pasolong, 2008, 33-35).

Keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan atau orang yang dipimpinnnya dapat mengikuti apa yang di kehendaknya dalam melaksanakan tugas.

Hal ini kita bisa lihat dari cara pembinaan dan pemberian motivasi yang dilakukan seorang kepala desa.

Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat penjelasan akan makna, dan maksud, tujuan, serta manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Sebab bagaimana pembangunan akan dilaksanakan, lebih banyak dimusyawatkan dengan warga desa umumnya dan dengan tokoh khususnya. Melalui pembinaan inilah dibangkitkan semangat kemauan serta ditumbuhkan jiwa membangun dalam diri warga desa agar desa lebih berdaya. Dalam membina kehidupan masyarakat, kepala desa menyatukan dirinya terhadap semua warga dimanapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan sekat-sekat antara pemerintah dengan masyarakat.

3. Peranan Informasional Kepala Desa

Peran informasional adalah bagaimana seorang pemimpin menjelaskan kepada bawahannya menyangkut rencana-rencana kebijakan, serta harapan pencapaian, dan instruksi tentang cara pekerjaan yang harus dilakukan, tanggung jawab bagi para bawahan atau anggota tim, dan tujuan-tujuan kinerja dan otorisasi rencana tindakan untuk mencapainya. Peran informasional akan berjalan efektif apabila komunikasi antara pimpinan dan bawahan berjalan baik dan efektif. Begitu juga sebaliknya apabila komunikasi tidak berjalan baik, tentu akan sangat sulit menyampaikan informasi kepada bawahan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara menurut para narasumber, kepala desa sendiri selalu mengajak warganya berdiskusi baik itu secara formal maupun non-formal. Hal ini beliau lakukan agar merangsang masyarakat desa untuk turut aktif dalam proses pembangunan. Peranan pemerintah sendiri khususnya kepala desa juga tidak pernah membeda-bedakan warganya. Sehingga tidak terjadi kecemburuan antar masyarakat yang akan mengakibatkan pada konflik sosial.

Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring tumbuhnya rasa percaya masyarakat desa kepada pemerintahnya. Rasa percaya ini akan tumbuh bila masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara. Koordinasi pembangunan desa secara partisipatif dilakukan kepala desa dengan mengajak warga masyarakat untuk bermusyawarah dalam setiap kebijakan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Kepala Desa

1. Faktor Pendukung

a. Kewibawaan

Berdasarkan hasil wawancara, kepala desa disini adalah seorang pemimpin yang dikenal dekat dengan masyarakatnya. Dia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang ramah dan peduli terhadap masyarakatnya, dekat dengan pemuda-pemuda desa. Tapi kedekatan dan keakraban dengan masyarakatnya tidak berarti beliau kehilangan kewibawaannya. Pak kepala desa adalah tipe orang yang pandai bergaul dan pandai menempatkan diri. Walau dia adalah seorang pemimpin di desa ini, tapi saat berbicara dengan orang yang lebih tua darinya beliau sangat sopan dan santun dalam berbicara, jadi tak heran jika beliau sangat disukai oleh masyarakat

b. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya karena hanya dengan kewenanganlah seseorang berhak memerintah orang lain (dalam Pasolong 2008, 107).

2. Faktor Penghambat

1. Kondisi Penduduk

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi penduduk yang masih sangat kental akan nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan secara turun temurun dan masih sulit menerima perubahan-perubahan. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, Pak Kepala Desa mampu meyakinkan masyarakat khususnya tokoh-tokoh masyarakat bahwa beliau juga mampu memimpin dengan bijak.

2. Partisipasi Penduduk

Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan,

kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah kebijakan. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakatnya sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil.

Berdasarkan hasil wawancara, kurangnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh kepala desa, hal ini karena warga desa cenderung tidak peduli dan lebih sibuk bekerja, sehingga mereka kurang tertarik dengan urusan pemerintahan khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tetapi berkat kegigihan kepala desa dalam mengajak warganya dan mendekatkan diri dengan masyarakat desa, sedikit demi sedikit masyarakat mulai membuka diri dan mulai tertarik untuk berpartisipasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Fasilitas dan Peralatan

Berdasarkan hasil wawancara, Kegiatan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh ketersediannya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam rapat desa dan kegiatan penyuluhan akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatan tulis menulis misalnya papan

tulis, LCD, sound system, proyektor dan laptop yang digunakan dalam rapat dan penyuluhan, masyarakat tidak begitu paham dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh karena hanya berupa penjelasan saja tanpa menggunakan alat bantu atau peraga sehingga masyarakat tidak begitu paham dan tertarik dalam mengikuti penyuluhan. Hal ini juga berdampak pada program pemberdayaan masyarakat yang lain.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal social yang sudah dianut oleh masyarakat desa sejak dulu, yakni menumbuhkan kembali semangat gotong royong. Sedangkan kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara bergotong royong. Sedangkan kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara bergotong-royong, baik itu dalam membersihkan desa, melakukan pembangunan desa, bahkan dalam menjaga keamanan desa dan

kegiatan lainnya. Pembinaan juga dilakukan melalui pendekatan keagamaan dengan merayakan hari-hari besar keagamaan, pendirian TK/TPA dan pengajian rutin setiap minggu. Selain kegiatan pembinaan kehidupan juga dilakukan oleh kepala desa melalui kegiatan non-formal seperti melakukan dialog terbuka kepada warganya.

Pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat pada pengelolaan keuangan desa dengan se-efisien mungkin. Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Rantau Panjang selain dengan mengembangkan potensi pertanian dan kelautan. Kepala desa juga membuka peluang swasta dalam mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa.

Kepala desa sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya berdiskusi baik itu secara formal maupun non-formal. Hampir setiap kegiatan pembangunan dan dalam mengambil suatu keputusan oleh kepala desa dilakukan melalui musyawarah.

2. Saran

Adapaun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Kepala Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong,

1. Peningkatan peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik dan ekonomi.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.
3. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.

F. REFERENSI

Sumber Buku :

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hariyono, P. 2010. *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan*

Paradigma. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Kartono, Kartini. 2001. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : Alfabeta.

Siagian, Sondang P. 2007. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.

Soetomo, 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2001. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007. *Pembangunan : Dilema dan*

Tantangan, Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.

Tohardi, Ahmad. 2002. *Pemahaman
Praktis : Manajemen Sumber Daya
Manusia*. Bandung : Bandar Maju

Dokumen :

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014
tentang Desa

PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Profil Desa Rantau Panjang Tahun 2019

Web

Indriyati. 2005. *Peran Kepemimpinan
Kepala Desa Terhadap
Pendaftaran Tanah di Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali*, dalam
http://elib.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/downloadDataById/1444/11_01434.pdf

Referensi Jurnal Skripsi :

Fathowari, Rabiul Andri. 2012. *Peran
Kepemimpinan Kepala Desa Dalam
Menumbuhkan Partisipasi
Masyarakat*. Skripsi.

Aleksia. 2020. *Efektivitas Kerja Pegawai
Dalam Pembuatan Akta Kelahiran
Dan Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sekadau*. Skripsi.